

SKRIPSI

**PERBANDINGAN MEKANISME PENGGUNAAN HAK ANGKET OLEH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SEBELUM DAN SESUDAH
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945 DALAM PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG PERNAH BERLAKU DI INDONESIA**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan
Program S1 Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*



Oleh:

FAUZIA DWINANDA

1710112007

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM TATA NEGARA (PK V)



Pembimbing :

Dr. Dian Bakti Setiawan, SH.,MH

Henny Andriani,SH.,MH

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2021

**PERBANDINGAN MEKANISME PENGGUNAAN HAK ANGKET OLEH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SEBELUM DAN SESUDAH
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945 DALAM PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG PERNAH BERLAKU DI INDONESIA**

ABSTRAK

Mekanisme penggunaan hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat telah banyak mengalami perubahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, mulai dari sebelum adanya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dan terakhir kembali ke Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD 1945 sebelum perubahan belum mengatur mengenai hak angket secara terperinci, akan tetapi sudah ada ditemukan permasalahan-permasalahan hak angket sebelum perubahan UUD 1945 yang dalam penyelesaiannya berpatokan kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket. Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah *pertama*, bagaimana mekanisme penggunaan hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945? dan yang *kedua*, bagaimana kekurangan dan kelebihan dari mekanisme penggunaan hak angket sebelum dan dan sesudah perubahan UUD 1945? Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, data yang digunakan adalah data sekunder, serta metode pengumpulan data berupa studi dokumen (kepuustakaan). Hasil penelitian pada skripsi ini dapat disimpulkan bahwa yang *pertama*, mekanisme penggunaan hak angket sebelum perubahan UUD 1945 yang berpatokan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 memiliki beberapa perbedaan mendasar dengan mekanisme penggunaan hak angket sesudah perubahan UUD 1945 dalam ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang MD3. *Kedua*, dengan adanya perubahan UUD 1945 maka pengaturan mengenai mekanisme hak angket semakin jelas karena sudah diatur di di dalam Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang MD3, dengan adanya perubahan tersebut maka tampak kekurangan dan kelebihan dari mekanisme penggunaan hak angket sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945.